

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui bahwasannya sebuah kebijakan akan memiliki suatu tujuan yang bersifat meringankan suatu beban yang ditanggung oleh masyarakat dalam suatu negara atau wilayah yang pada dasarnya mencakup urusan ekonomi, pendidikan kesehatan bahkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat didalamnya. Belakangan ini pemerintahan baru di era Joko Widodo memiliki suatu kebijakan atau gebrakan baru dalam dunia pendidikan masyarakat Indonesia, yang tentunya memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan suatu standarisasi pendidikan di Indonesia.

Seperti halnya kota besar lainnya Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang bisa dikatakan sebuah Kabupaten dengan mayoritas penduduk terbesar ke-3 se-Jawa Timur. Mayoritas masyarakat kabupaten Jember yang bisa dikatakan menengah kebawah sangat membutuhkan suatu perubahan yang dinilai mampu untuk dapat memberikan suatu perubahan kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakatnya khususnya dalam hal pendidikan masyarakat Kabupaten Jember bisa dikatakan masih rendah tingkat partisipasi yang menyangkut Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hal ini dapat kita lihat dari tingkat partisipasi siswa dalam menuntut ilmu yang masih kurang, dan salah satu indikator tersebut dikarenakan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan masih kurang karena alasan tuntutan ekonomi yang kurang sehingga banyak siswa di kabupaten Jember ini khususnya kecamatan Kaliwates yang putus sekolah. Dengan kehadiran kebijakan Kartu Sakti khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pemerintahan Jokowi ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu solusi yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Jember khususnya di wilayah penelitian penulis di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan baru yang di keluarkan di tahun 2014 dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini merupakan dasar hukum bagi

Pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan menerbitkan kartu yang disebut-sebut sebagai “Kartu Sakti”.

Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah mulai dari 6-12 tahun dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat program Indonesia Pintar. Untuk tahap awal ini di tahun 2014 pemerintah telah mencetak sekitar 160ribu Kartu yang ditujukan untuk seluruh siswa yang membutuhkan di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Jember.

Perpres ini diterbitkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program yang bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, sehingga bisa mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah kabupaten Jember.

Salah satu bentuk untuk mengurangi penduduk miskin tersebut dilakukan pemberian bantuan berupa kartu yang memiliki kegunaan untuk dapat membantu memberikan keringanan bagi masyarakat Kabupaten Jember yang setidaknya terdapat tiga program unggulan perlindungan sosial, pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program. Kartu identitas tersebut adalah kartu keluarga sejahtera untuk menerima program simpanan keluarga sejahtera, kartu Indonesia Pintar untuk penerima program Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat untuk penerima program Indonesia Sehat.

Dalam hal pendidikan ini, sangat diharapkan kartu yang memiliki fungsi dalam bidang pendidikan normatif mulai dari SD, SMP, dan SMA ini untuk dapat memberikan suatu perubahan Pendidikan yang lebih maju di Indonesia dan diharapkan pemerintah kabupaten Jember khususnya dalam wilayah penelitian untuk mampu memberikan kontribusi pasti dalam hal pelaksanaan perpres ini yang tentunya untuk mensukseskan fungsi dari Kartu Indonesia Pintar itu sendiri, melihat antusiasme masyarakat Jember yang berharap tinggi kepada suatu kebijakan yang dinilai bisa dapat memberikan suatu keringanan khususnya dalam bidang pendidikan anak anaknya yang berkelanjutan.

Guna mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pembentukan tim ini juga telah ditetapkan dalam perpres itu sendiri. Serta pendanaan bagi pelaksanaan program ini bersumber dari APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun terdapat kontra atas penerbitan perpres tersebut. Yakni perpres tersebut berlaku pada tanggal 10 November 2014, sedangkan peluncuran kartu sakti telah diluncurkan pada tanggal 3 November 2014. Peluncuran tersebut mengacu pada instruksi presiden (Inpres) No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga Produktif.

Penelitian ini sangat penting dan menarik karena peneliti menganggap bahwa suatu program yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah dalam Perpres No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Namun dilain sisi jumlah penerima kartu sakti tersebut di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates ini yang diharapkan mampu untuk memberikan suatu perubahan mendasar masih belum efektif dan efisien karena masih kurangnya pemahaman fungsi dari kartu tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates?
2. Bagaimana efektifitas peran pelaksana di lapangan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan kartu indonesia pintar di Kecamatan Kaliwates.
2. Untuk mengetahui seberapa efektifkah peran pelaksana di lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan kegunaan dalam:

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten jember untuk lebih meningkatkan kontribusi dalam mensukseskan program yang ditetapkan oleh perpres.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Jember khususnya Dinas Pendidikan dalam pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan terhadap Masyarakat untuk penerimaan kartu sakti itu sendiri khususnya.
3. Dan sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dalam topik atau permasalahan yang sama.